

# Pelarangan Film 'Samin' Dinilai Mengebiri Hak Berpendapat

JAKARTA — Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Siti Noor Laila, mengatakan pelarangan pemutaran dua film dokumenter oleh Universitas Brawijaya, Malang, telah memberangus hak berpendapat mahasiswa. "Film merupakan bagian dari kritik sosial dan intelektual yang dibuat oleh anak bangsa. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk melarang pemutarannya," kata Siti kemarin.

Siti mengatakan Universitas tidak berhak mencampuri substansi film yang akan ditonton mahasiswa. Sebab, mahasiswa merupakan insan intelektual yang sudah bisa menyaring segala informasi yang didapatkannya. "Kami

minta universitas mencabut larangan itu," ujarnya.

Universitas Brawijaya Malang melarang pemutaran dua film dokumenter, yakni *Alkinemokiye* dan *Samin Vs Semen* hasil produksi Watchdoc. Kedua film ini akan diputar pada 1 Mei, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia, oleh lembaga pers mahasiswa DIANSS dari Fakultas Ilmu Administrasi. "Utusan dekanat menganggap film tersebut provokatif," kata pegiat LPM Dianns, Esa Kurnia Alfarizi. Alasan lainnya, 1 Mei merupakan hari libur, sehingga tak boleh ada kegiatan mahasiswa di dalam kampus.

Menurut Esa, kedua film tersebut tak meng-

andung unsur provokatif. Film *Alkinemokiye: From Struggle Dawns New Hope* mengisahkan perjuangan buruh tambang Freeport di Papua, yang memperjuangkan peningkatan nilai upah mereka.

Adapun film *Samin Vs Semen* mengisahkan pengikut ajaran Samin di pegunungan karst di Kendeng, Jawa Tengah, yang menolak industri semen. Setelah pemutaran film usai, acara dilanjutkan dengan diskusi untuk membedah film dengan menghadirkan akademisi, aktivis buruh, dan lembaga swadaya masyarakat. "Kami akan melaporkan masalah ini ke Komnas HAM dan Ombudsman," ujar Esa.

Pembantu Dekan II

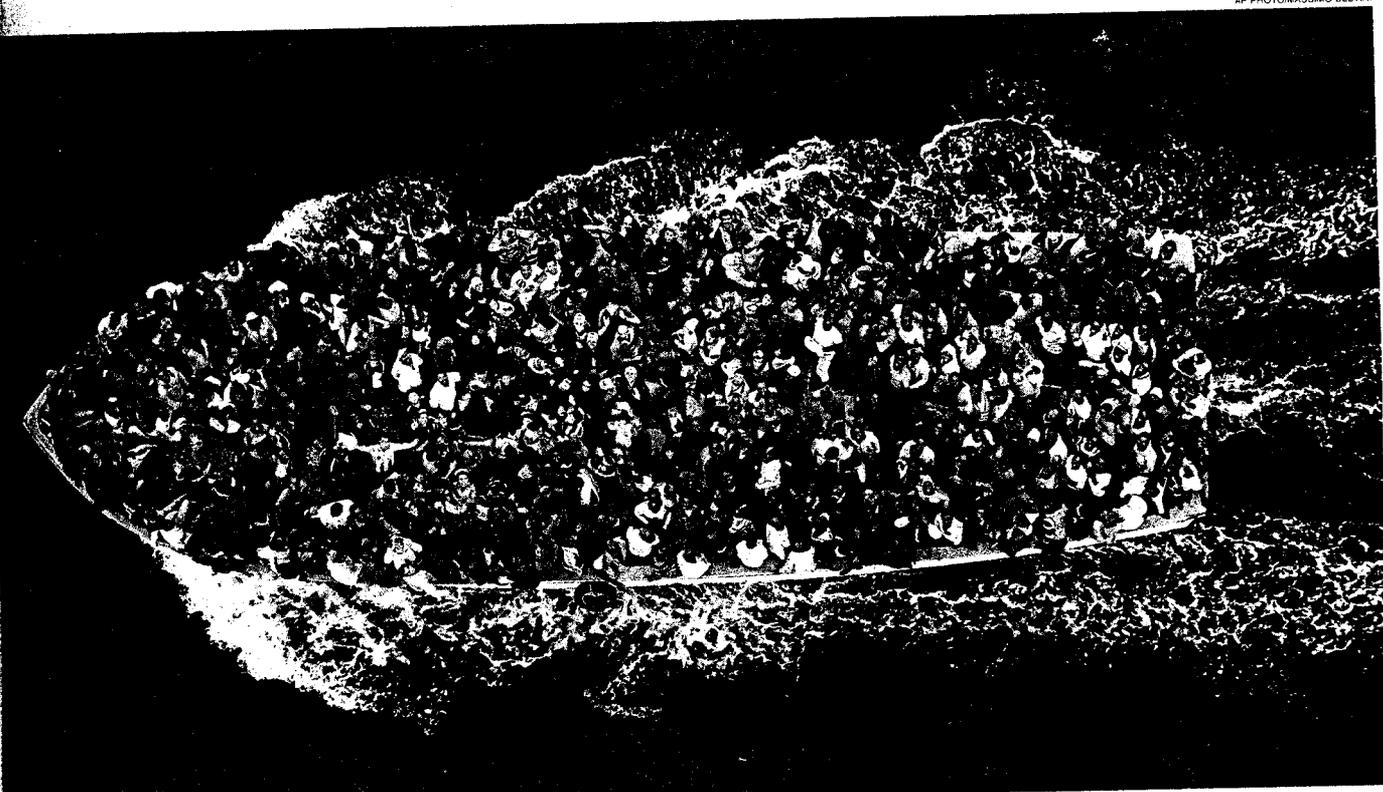
Fakultas Ilmu Administrasi, Sri Mangesti, saat diminta konfirmasi, menolak memberi penjelasan soal pelarangan itu. "Maaf Pak, saya lagi di kelas," tutur dia.

Juru bicara Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko, mengatakan tengah membahas apakah kedua film itu mengandung unsur provokatif. Ia mengaku belum tahu isi film tersebut dan tak mengetahui adanya larangan pemutaran film ini oleh pejabat di dekanat.

Menurut Anang, pemutaran film dilarang di kampus jika bertentangan dengan ideologi ketuhanan. "Seharusnya tak ada larangan, kecuali bertentangan dengan ideologi ketuhanan," kata dia.

# Internasional

AP PHOTO/MASSIMO SESTINI



Dalam foto yang menjadi pemenang kedua World Press Photo untuk kategori Berita Umum pada 12 Februari lalu, tampak para imigran diselamatkan oleh penjaga pantai Italia pada Juni 2014.

## 'DOSA EROPA' DALAM INSIDEN MEDITERANIA

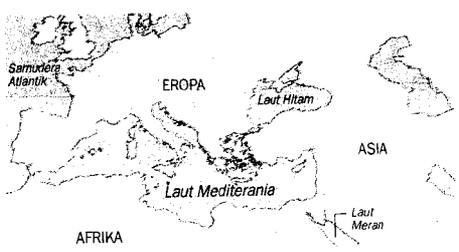
Imigrasi legal diyakini akan menghentikan perjalanan laut berbahaya para pencari suaka.

Sita Planasari Aquadini  
sitaplanasari@tempo.co.idw

**LUKSEMBURG** — Uni Eropa kemarin menuai tekanan dan kecaman menyusul karamnya kapal imigran bersama 700 penumpangnya di Laut Mediterania pada Ahad lalu. Jika tragedi ini terkonfirmasi, hal ini akan menjadi kematian terbanyak imigran gelap di wilayah Mediterania. "Tidak ada seorang pun yang boleh tewas seperti ini," kata Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat.

Lembaga pegiat hak asasi manusia Eropa menuding tak maksimalnya operasi penyelamatan Uni Eropa menjadi salah satu faktor pemicu terus berulangnya kematian pencari suaka di perairan tersebut. Pada akhir 2013, Italia, sebagai pintu gerbang Eropa yang menerima banyak imigran, menggelar operasi penyelamatan di Mediterania dengan nama Mare Nostrum. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 100 ribu imigran dari ganasnya Laut Mediterania. Namun, dengan biaya 9

juta euro atau setara Rp 124,8 miliar per bulan, Italia kewalahan. Negara Pizza itu kemudian meminta negara-negara Uni Eropa lain untuk membantupendanaan operasi ini. Permintaan Italia ditolak oleh sejumlah negara Uni Eropa lain. Mereka yang menolak berdalih mendanai operasi penyelamatan justru akan menambah gelombang imigran. Untuk menggantikan operasi penyelamatan Italia, Uni Eropa meluncurkan operasi lain pada Oktober 2014. Operasi bertajuk Triton ini hanya memiliki ang-



garan sepertiga dari Mare Nostrum. Hasilnya, sekitar 900 imigran, di luar tragedi Ahad lalu, tewas sejak awal tahun ini. Jumlah ini lebih banyak dibanding pada kuartal pertama tahun lalu. "Eropa secara kolektif bersalah atas kematian ratusan imigran di Mediterania," ujar Bernard Kouchner, bekas menteri luar negeri Prancis kepada harian, *Le Parisien*, kemarin. Kouchner, yang juga pendiri lembaga Dokter Lintas Batas, mendesak Uni Eropa untuk membangun operasi penyelamatan baru dengan 28 kapal. Sebagai tujuan utama para pencari suaka asal Afrika dan Timur Tengah, negara-negara di Eropa

juga menghadapi semakin besarnya sentimen anti-imigran. Partai-partai sayap kanan Eropa memenangkan sebagian besar pemerintahan karena rakyat khawatir dengan membanjirnya imigran. Pemerintahan yang dihasilkan pun berusaha menghalangimasuknya imigran ke negara mereka. "Kita harus sadar bahwa tidak ada penyelesaian yang mudah ataupun solusi ajaib untuk menghentikan kematian imigran di Laut Mediterania," tutur Federica Mogherini, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, di Luksemburg, kemarin. Bekas menteri luar negeri Italia ini juga menekankan operasi penyelamatan sama pentingnya dengan operasi

menindak para pelaku perdagangan manusia yang membawa para imigran melalui Mediterania. Desakan serupa dilontarkan oleh ketua parlemen Eropa, Martin Schulz, pada Ahad lalu. "Sangat memalukan bagaimana begitu banyak negara menolak bertanggung jawab menerima imigran." Dalam wawancara dengan BBC dua bulan lalu, Schulz menyebut salah satu cara untuk mengurangi tragedi kemanusiaan di Mediterania adalah dengan membuat para imigran masuk ke Eropa secara legal. Dengan kuota cermat di antara 28 negara anggota Uni Eropa, Schulz yakin cara ini akan menghentikan imigrasi ilegal. Ia mengakui bahwa usul yang dilontarkannya sulit diterima rakyat Eropa yang semakin bergerak ke sayap kanan. Rakyat Eropa, menurut dia, harus paham bahwa dunia berubah dengan semakin besarnya pergerakan manusia. "Manusia secara global berpindah, termasuk ke Eropa."

# Waspadai Kekerasan Anak melalui Internet

anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, serta produktif, dengan jadi teladan terlebih dulu bagi siswa mereka.

## Roadshow anak

Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyampaikan saat ini pihaknya tengah menjalani *roadshow* deklarasi suara anak-anak Indonesia sebagai bentuk implementasi Pasal 10 UU Perlindungan Anak.

"*Roadshow* dilakukan di beberapa tempat untuk menyuarakan pendapat mereka agar kekerasan bisa dihentikan," ungkap Arist.

Selama ini, ujar Arist, hanya orang dewasa yang menyerukan setop kekerasan. Melalui kerja sama dengan Kementerian PP-PA, pihaknya bertekad mengkampanyekan untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak.

"Kami targetkan juga ada ruang publik ramah anak yang tercipta agar tidak ada lagi terjadi kekerasan seksual pada anak," tukas Arist. (H-2)

fetry@mediaindonesia.com

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan membuat peraturan yang melarang anak usia dini menggunakan telepon seluler.

## FETRY WURYASTI

INDONESIA sudah dikategorikan dalam darurat kekerasan terhadap anak. Itu terlihat pada kekerasan yang tak hanya muncul di rumah, sekolah, dan masyarakat, tapi juga pada anak-anak dengan modus internet.

"Sekarang banyak modus internet. Saya akan buat peraturan menteri bahwa anak usia dini tidak boleh memegang ponsel untuk mengantisipasi kemungkinan mereka

melihat situs kekerasan dan pornografi dalam ponsel dan menirunya," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Yambise dalam *talkshow* sebagai rangkaian peringatan HUT ke-40 Taman Mini Indonesia Indah (TMII), di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, Yohana mengimbau agar orangtua berhati-hati karena perkembangan teknologi bisa mengubah watak anak dan orangtua sendiri. Rumah sebagai tempat edukasi

pertama harus jadi ruang yang paling ramah bagi anak.

"Lingkungan rumah sebagai pendidikan pertama harus ramah anak dan hak-hak mereka harus dijaga. Ajarkan mereka menghargai satu sama lain. Saat di sekolah, orangtua harus mengawal karena di sekolah juga ada kekerasan, pelecehan, *bullying* terhadap anak," papar dia.

Yohana juga tengah berdiskusi dengan Komisi VIII DPR untuk menempatkan persoalan kekerasan seksual, pencabulan, dan *bullying* dalam prioritas program mereka.

"Ini tugas kita semua untuk menanggulanginya. Kementerian PP-PA akan berbagi tugas dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

untuk bersentuhan langsung dengan anak dan menyosialisasikan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan anak," papar Yohana.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menambahkan agar sekolah, keluarga, dan masyarakat sama-sama menanamkan nilai Pancasila pada siswa dan anak mereka secara lebih mendalam.

"Sehingga yang terjadi bukanlah kekerasan, melainkan jiwa berbudaya, bermartabat, dan gotong royong, bukannya bangsa individualisme apalagi saling menumbuhkan kekerasan," ungkap dia.

Puan mengatakan guru di sekolah harus membentuk

# Dokter Tetap Bisa Dipidana



Mahkamah Konstitusi menilai kode etik tidak memiliki sanksi yang sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat kelalaian dokter.

INDRIYANI ASTUTI

**M**AHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian UU Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran yang diajukan oleh sejumlah dokter dari Dokter Indonesia Bersatu (DIB). Itu merupakan penegasan bahwa masih ada potensi bagi profesi dokter dituntut atau dikenai

sanksi pidana akibat kesalahan medis.

Dalam amar petimbangannya, majelis hakim MK yang diketuai oleh Arief Hidayat menyatakan profesi dokter merupakan profesi yang istimewa dan berhubungan dengan nyawa manusia. Karena itu, sudah sewajarnya jika profesi dokter, selain diatur secara etika berdasarkan kaidah keilmuan (disiplin profesi), harus diatur pula

menurut hukum.

"Kode etik tidak memiliki sanksi yang sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Risiko dari kelalaian dapat menimbulkan kerugian bagi pasien," ujar hakim konstitusi Muhammad Alim dalam sidang pleno pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Mahkamah berpendapat tetap diperlukan perlindungan hak-hak pasien bila tindakan dokter dinyatakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) melanggar disiplin profesi kedokteran dan menimbulkan kerugian

**Keputusan MK tidak hanya mengecewakan, tetapi juga dinilai tidak berkeadilan. Hal itu bisa berakibat pada kehati-hatian berlebih pada dokter.**

pada pasien.

Sebelumnya, kuasa hukum DIB Lutfie Hakim mengatakan Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran masih bias. Seharusnya, menurut dia, hanya tindakan kedokteran yang mengandung kesengajaan dan kelalaian yang dapat dituntut sanksi pidana.

Pada kesempatan terpisah,

dokter Agung Saptahadi dari DIB selaku pemohon menyatakan seharusnya profesi dokter baru dapat dipidanakan apabila telah ada rekomendasi etik dari MKDKI.

**Dikritik**

Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) HN Nazar mengutarakan keputusan MK tersebut tidak hanya mengecewakan, tetapi juga dinilai tidak berkeadilan. Bahkan, hal itu bisa berakibat pada kehati-hatian berlebih pada dokter dalam menangani pasien.

"Kalau persoalan administrasi izin praktik saja bisa

diseret ke pidana, ini kan bahaya. Dokter apa harus mikir dua kali kalau ada pasien yang perlu segera ditangani cuma karena izinnya belum diperpanjang," tuturnya.

Menurut dia, IDI akan membahas dan mengkaji ulang dengan membandingkan pada UU Praktik Kedokteran sebelumnya.

"Tadi kan baru dibacakan, setelah kita dapat hasil sahnya akan langsung kita bahas bersama-sama."

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Menaldi Rasmin pun mengkritik keras putusan MK. Alasannya, dokter ialah profesi yang bekerja dalam penjagaan

Kode Etik Kedokteran Indonesia serta standar-standar yang harus dipenuhinya.

Kasus pemidanaan dokter salah satunya melanda dr Dewa Ayu Sasiary Prawari, dr Hendry Simanjuntak, dan dr Hendy Siagian di Rumah Sakit Kandou, Manado.

Mereka diduga melakukan kegiatan malapraktik yang mengakibatkan meninggalnya Julia Fransiska Makatey, pada 10 April 2010. Namun, ketiganya dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung setelah mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). (Mut/H-1)

indri@mediaindonesia.com



●● ROMA, ITALIA

# Kapal Tenggelam 700 Imigran Tewas

**S**EKITAR 700 orang diperkirakan tewas saat sebuah kapal yang sarat penumpang imigran tenggelam setelah meninggalkan Libia dalam perjalanan menuju Italia.

Pengakuan para penyintas insiden tersebut mengungkapkan bahwa kapal nelayan sepanjang 20 meter itu berisi sekitar 700 orang. Kapal itu tenggelam pada malam hari saat situasi sangat gelap.

Penjaga pantai Italia dan Malta menerima sinyal permohonan bantuan dari kapal yang tenggelam itu pada Sabtu (18/4) tengah malam waktu setempat saat kapal itu berada sekitar 126 kilometer dari pantai Libia.

Penjaga pantai Italia kemudian memerintahkan kapal dagang terdekat untuk memberikan bantuan. Kapal berbendera Portugal bernama King Jacob kemudian tiba di lokasi saat kapal nelayan berisi imigran itu tenggelam.

Kapal milik pemerintah Italia, Malta, dan sejumlah kapal dagang segera bergerak ke lokasi untuk mencari penumpang yang masih selamat tetapi mereka hanya berhasil mendapatkan 24 jenazah. Jenazah-jenazah itu kemudian dibawa ke Malta.

Penjaga pantai Italia yang memimpin pencarian penyintas dan jenazah korban kecelakaan itu mengatakan hanya 29 orang yang selamat.

"Ini mungkin kecelakaan terparah di Mediterania sepanjang masa," ujar juru bicara Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) Carlotta Sami.

Perdana Menteri Italia Mat-

teo Renzi menegaskan bahwa penjaga pantai 'Negeri Spageti' itu akan berusaha mencapai bangkai kapal tersebut dan memastikan jenazah yang bisa dikeluarkan mendapatkan pemakaman yang layak.

Kepala kebijakan Uni Eropa Federica Mogherini yang merupakan mantan menteri luar negeri Italia menyebut kecelakaan kapal imigran itu merupakan tamparan bagi organisasi negara-negara Eropa tersebut. "Kita telah berulang kali mengatakan tidak ingin insiden seperti ini terulang lagi. Kini, tiba saatnya bagi Uni Eropa untuk segera menjalankan janji," tegasnya.

Kecelakaan yang kerap kali terjadi di Selat Mediterania tersebut memancing Paus Fransiskus dan sejumlah pemimpin Eropa lainnya untuk menyeru

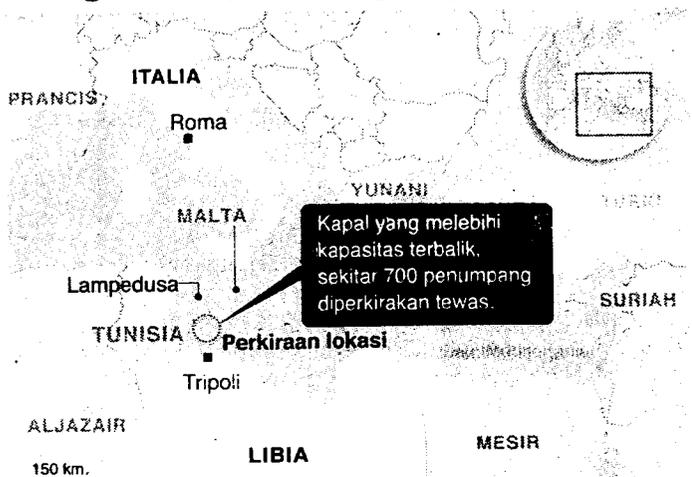
kepada Uni Eropa agar segera mengambil tindakan supaya hal serupa tidak terulang kembali.

Kecelakaan pada Sabtu (18/4) malam itu merupakan yang terbaru dalam rangkaian tenggelamnya kapal pengangkut imigran asal Libia.

Sebelumnya, insiden terparah terjadi pada September 2014. Kala itu, sebanyak 500 imigran diperkirakan tewas ketika perahu yang mereka tumpangi sengaja ditabrak kapal yang berisi para pelaku perdagangan manusia yang memaksa para imigran itu naik ke kapal mereka.

Pada Oktober 2013, lebih dari 260 imigran asal Afrika tewas ketika kapal nelayan yang mereka tumpangi terbakar di lepas pantai Lampedusa. (AFP/Bas/I-1)

## Tragedi Kapal Pengungsi



\* Penjaga pantai menerima tanda bahaya sekitar Sabtu (18/4) tengah malam.

\* Kapal terbalik akibat para penumpang berdesakan ke salah satu sisi kapal agar dapat dievakuasi ke kapal penyelamat.

\* Penjaga pantai Italia menyatakan hanya 28 orang hidup dari kapal yang tenggelam.

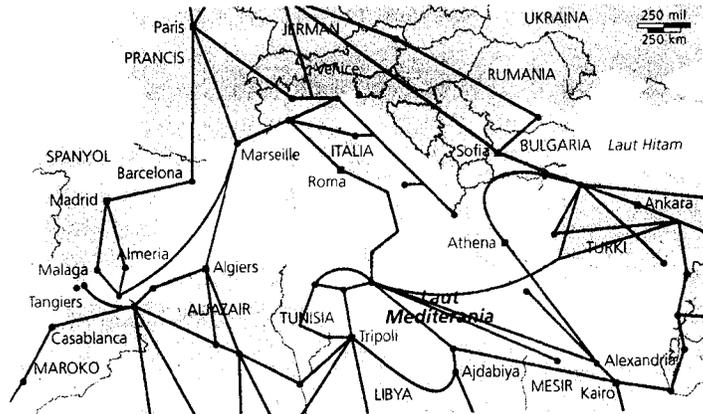
**Empat Jalur Penyeberangan Laut Paling Mematikan pada 2014**

Laut Mediterania      Teluk Bengal

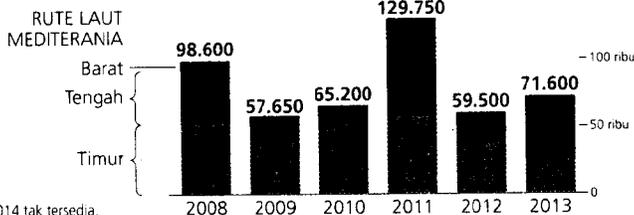
**3.419 korban**

Teluk Aden dan Laut Merah **242 korban**  
Laut Karibia **71 korban**

**RUTE MIGRASI LAUT MEDITERANIA**



**JUMLAH PENYEBERANGAN PERBATASAN ILEGAL**



Sumber: United Nations High Commissioner for Refugees; iMap; Frontex.

W. Foo, 15/02/2015

REUTERS

**ALIRAN MIGRAN KE MEDITERANIA**

**13.500** migran berhasil diselamatkan antara 10-17 April 2015.

**900** migran tewas saat menyeberang antara 1 Januari-15 April.

**31.500** migran dari Afrika Utara berhasil menyeberangi

Mediterania.

**218 ribu** orang telah menyeberangi Mediterania pada 2014.

**3.500** migran tewas saat berusaha menyeberang tahun lalu.

Loukas Mastros/EPA



● Sejumlah migran tiba di pantai Zefyros Kepulauan Rhodes, Yunani, Senin (20/4).

**BENCANA MEDITERANIA**

**Oktober 2013**  
360 orang, kebanyakan warga Somalia dan Eritrea, tewas karena kapal yang ditumpanginya mereka tenggelam di Lampedusa, Italia.

**Februari 2015**  
300 migran tenggelam setelah kapal mereka meninggalkan pantai Libya dalam cuaca buruk.

**19 April 2015**  
Sekitar 700 migran dikhawatirkan tenggelam setelah kapalnya terbalik di perairan Libya, sebelah selatan Lampedusa, Italia.

**Sept 2014**  
300 migran tenggelam di Malta.

**12 April 2015**  
400 migran tenggelam setelah kapal mereka terbalik di perairan Libya.

Sumber: unhc/bscf/reuters

**700 Migran Tenggelam di Mediterania**

■ Gita Amanda, Lida Puspaningtyas

**PALERMO** — Sebanyak 700 migran dikhawatirkan tewas di Laut Mediterania, Ahad (19/4). Perahu sepanjang 20 meter yang mereka tumpanginya, terbalik dan tenggelam selepas perairan Libya yang berjarak 210 km dari Kepulauan Lampedusa, Italia.

Sebuah kapal dagang besar asal Portugis, King Jacob, melintas dekat perahu nahas tersebut sebelum akhirnya sepenuhnya tenggelam. Saat itu, para penumpang bergerak ke salah satu sisi perahu dan meminta pertolongan King Jacob. Hal itu membuat perahu oleng kemudian terbalik.

Bila jumlah korban sebanyak 700 orang itu terkonfirmasi, maka tahun ini sudah 1.500 migran yang kehilangan nyawa saat berusaha mencapai Eropa. Para migran ini dibawa menyeberangi Laut Mediterania oleh pedagang manusia. Mereka semuanya berangkat dari Libya.

Hingga Ahad malam, kapal dan helikopter Italia serta beberapa negara lainnya berupaya menemukan para migran. "Sebanyak 18 kapal dikerahkan, tetapi hanya 28 orang selamat yang berhasil ditemukan," kata Perdana Menteri Italia Matteo Renzi.

Selain 28 migran selamat, tim pencari juga menemukan 24 jenazah. Sebagian yang selamat dikirimkan ke RS Canizzaro, Catania, Sisilia, dan sisanya ke Malta. Salah satu migran asal Bangladesh yang selamat menuruti, ada 950 orang di perahu itu.

Sebagian besar dari mereka, terkunci di dek-dek bawah dan tak boleh keluar dari sana oleh pedagang manusia yang membawa mereka menyeberangi Mediterania. Menurut Jaksa Italia Giovanni Salvi, warga Bangladesh itu menjelaskan, sekitar 300 orang dikunci di dek bawah.

Sebanyak 200 di antaranya perempuan dan puluhan lainnya anak-anak. Sementara, petinggi Polisi Perbatasan Italia Jenderal Antonino Iraso menyampaikan analisisnya mengapa perahu itu tenggelam dan menewaskan banyak orang.

Menurut dia, jika ratusan orang dikunci di bagian bawah kapal, masuk akal kalau yang selamat hanya segelintir orang. Sebab, berat bertumpu di bagian bawah perahu. "Tentu saja perahu itu tenggelam."

Pada Senin (20/4), Uni Eropa menggelar pertemuan tingkat menteri luar negeri membicarakan masalah ini di Luksemburg. Di sisi lain, Eropa pun didesak segera mencari dana untuk mengatasi kemelut di Libya dan Timur Tengah sebab migran kebanyakan berasal dari sana. ■ ap/reuters ed: ferry kishandi

**TIM TRANSISI TANGANI ISL**

■ Ali Mansur, Rahmat Fajar

**Polri tak ingin gegabah izinkan perbandingan ISL di bawah PSSI.**

**JAKARTA** — Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memutuskan melimpahkan sepenuhnya kewenangan pengelolaan Indonesia Super League (ISL) kepada tim transisi yang selekasnya dibentuk. Pelimpahan tersebut untuk mengatasi kekosongan pengelola kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia selepas pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh Kemenpora.

Menurut Deputi V Kemenpora Gatot S Dewa Broto, kewenangan tim transisi terkait ISL ditetapkan dalam rapat pada Senin (20/4). Selanjutnya, tinggal menunggu Kemenpora Imam Nahrawi mengeksekusi kewenangan itu. "Kita belum kantongi nama tim transisi. Tapi, kita sudah bahas kewenangannya untuk mengambil alih pengurusan PSSI," ujar Gatot, kemarin.

Ia mengungkapkan, nantinya tim akan menangani segala tugas dan kewajiban PSSI hingga terbentuk pengurus baru dan kompetisi bisa dijalankan kembali. Tim transisi juga diberi kewenangan menunjuk operator lain untuk menjalankan kompetisi. Selama ini ISL dioperasikan oleh PT Liga Indonesia.

Namun, Gatot menegaskan, hal itu belum bisa dipastikan sebelum tanggal 25 April, waktu di mana PSSI menyatakan akan mulai menggelar lagi ISL yang sempat dihentikan sementara. "Dia (tim transisi) bisa tunjuk operator liga. Tapi, belum bisa secepatnya karena perlu pembahasan lagi," kata Gatot.

Menurutnya, tim transisi tidak akan diambil dari pengurus PSSI. Ia juga menjanjikan

anggota tim transisi tak memiliki kepentingan sepihak terkait persepakbolaan Indonesia.

Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Noor Aman menegaskan, dengan pengambilalihan pengurusan PSSI, bisa saja PT Liga Indonesia tak jadi operator ISL. Namun, PT Liga dan PSSI akan tetap dimintai pertanggungjawaban untuk menyelesaikan utang terhadap klub-klub.

Menpora Imam Nahrawi resmi menandatangani pembekuan terhadap PSSI sejak Jumat (17/4). Pembekuan itu dengan alasan PSSI tak mengindahkan surat peringatan Kemenpora yang meminta Arema Cronus Malang dan Persebaya Surabaya menyelesaikan masalah legalitas keduanya.

Kedua klub itu dilarang BOPI mengikuti ISL 2015 yang berganti nama menjadi QNB League sebelum menyelesaikan dualisme pengurusan. Namun, PSSI ngotot menyertakan dua klub itu dalam kompetisi. Sikap tersebut mendorong PSSI menghentikan sementara ISL sejak 12 April lalu.

Di pihak lain, ketua umum baru PSSI, La Nyalla Mattalitti, menegaskan, PSSI akan tetap menggelar ISL pada Sabtu (25/4) mendatang. "Untuk ISL dan Divisi Utama akan berjalan sesuai jadwal. Kompetisi harus segera berjalan, tidak boleh terhenti terlalu lama," kata dia.

Meski begitu, rencana digelarnya ISL oleh PSSI tersebut belum tentu mendapat izin dari kepolisian. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan, Polri tidak akan gegabah memberikan izin pertandingan.

Menurut Anton, polisi akan menelaah betul potensi terjadinya konflik sebelum mengeluarkan izin untuk gelaran yang diadakan PSSI. "Kita lihat sepanjang potensi konflik tinggi tidak diizinkan," ujar Anton, kemarin.

Ia menegaskan, soal legalitas adalah ranah Kemenpora dan PSSI. Kepolisian hanya menyesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. ■ e27/c03 ed:fitriyan zamzami

**Depth**

**KOI dan KONI Lepas Tangan**

Him-9

MAULANI A ROTINSULU PRESIDIDIUM NASIONAL KELOMPOK KEPENTINGAN PENYANDANG DISABILITAS KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK Keadilan dan Demokrasi

# KAUM DIFABEL

## Masih Menjadi Kelompok Marginal

**W**artawan *Republika*, R: Laeny Sulistyawati, belum lama ini mewawancarai Maulani A Rotinsulu. Maulani adalah salah seorang aktivis perempuan pejuang hak-hak kaum difabel, khususnya di kalangan perempuan. Berikut pendapatnya soal paradigma dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia.

### Sejak kapan Kelompok Kepentingan Penyandang Disabilitas didirikan?

Saya adalah perempuan penyandang disabilitas dan kami punya organisasi. Waktu itu namanya Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia. Nah, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ini selalu membantu kelompok kami. KPI menolong kami untuk membuat buku-buku advokasi, agenda, dan hak-hak difabel. KPI juga selalu mendukung kami dari belakang. Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia bersama KPI saling mendukung terkait dengan perempuan. Kami *kan* hanya bagian dari kelompok perempuan dan kami butuh dukungan dari gerakan perempuan lainnya. Karena itu, kami menjadi anggota presidium KPI dalam kongres KPI sejak 2014 lalu.

### Bisa dijelaskan visi dan misi lembaga ini?

Visi dan misinya adalah bagaimana membawa penyandang disabilitas difabel pada gerakan *mainstream* perempuan seperti pada umumnya. Selama ini kami *kan* hanya anggota. ikut-ikutan saja. Tetapi, untuk diberikan untuk kesetaraan dalam kepemimpinan perempuan itu belum sama sekali. Oleh karena itu, kami mencoba melihat kesempatan dan kesetaraan perempuan difabel dalam kepemimpinan itu bisa dilakukan.

### Apa saja ruang lingkup kerja, kajian, dan penelitian lembaga ini?

Untuk sementara ini, kami memang mendukung dan mengawal rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Hak Disabilitas.

### Bagaimana Anda menilai negara selama ini dalam hal pemenuhan hak-hak difabel?

Kita *kan* sudah punya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 97 tentang Penyandang Cacat. Di situ ada enam isu yang dikawal, di antaranya kesamaan kesempatan, pendidikan, tenaga kerja, aksesibilitas, dan kesehatan. Untuk pemenuhannya, sebenarnya sudah dilakukan pemerintah. Tetapi, faktanya enam isu dalam UU itu tidak terimplementasikan dengan baik. Pengelolannya sebenarnya masih karitatif. Arti pengelolaan karitatif adalah pembuatan kebijakan-kebijakan terkait penyandang cacat itu tidak dikonseptkan membangun si kaum difabel, tetapi hanya difabel yang penerima satu manfaat saja. Konsep pemerintah hanya memelihara orang tidak mampu. Jadi, yang mereka lakukan adalah tidak memberikan kesamaan kesempatan itu.

Penanganan difabel malah menyudutkan ke arah eksklusivisme dan proteksi. Contohnya sekolah luar biasa (SLB) yang sangat eksklusif, yaitu kami dengan kami saja. Ini sebenarnya bagus karena memberikan pemahaman kemandirian. Tapi, tetap membuat seorang difabel ini tidak bisa masuk ke dalam masyarakat.

Kesannya kami dikhususkan eksklusif karena tidak punya kemampuan. Kami

juga berpikir tidak ada jalan lain penyandang dieklusifkan seperti itu. Hampir kami semua percaya bahwa kami tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan untuk menjadi sesuatu. Termasuk menjadi guru, pengacara, atau profesi lain di dunia ini karena yang pemerintah lakukan kepada kami seperti itu.

Selain itu, kesempatan perempuan difabel untuk mendapatkan akses kepemimpinan masih dianggap persaingan. Bukan karena ketidakmampuan kami, melainkan kita memang tertindas untuk hal-hal seperti itu. Padahal, pemerintah *kan* tidak selalu menjaga difabel seumur hidup kami *kan*. Misalnya, dalam lembaga kepanitiaan untuk difabel hanya 0,0 sekian persen yang bisa dijaga. Seharusnya, pemerintah mencari jalan bagaimana mengupayakan kekuatan masyarakat untuk membangun seorang difabel yang tidak hanya melulu bergantung pada orang lain.

Melalui konvensi yang baru kami didorong bahwa masyarakat dunia kalau kami bisa kalau diberikan kesempatan. Tapi, bukan hanya diberikan kesempatan begitu saja, melainkan plus fasilitasnya, aksesibilitas, kesetaraan perlakuan, akomodasi yang memiliki alasan. Kesamaan kesempatan harus sama dengan kesetaraan perlakuan. Misalnya, penyandang cacat seperti tunanetra, tunarungu boleh masuk tes calon penerima pegawai negeri sipil (CPNS), tetapi harus ada akomodasi yang layak atau penyesuaian yang layak. Misalnya, seorang tunanetra diberikan soal terdiri huruf braille. Aksesibilitas kebutuhan orang per orang atau akomodasi yang layak.

### Adakah data yang bisa menggambarkan kondisi kaum difabel di Indonesia saat ini?

Kita tidak punya data angka karena sejak zaman dulu *nggak* pernah ada hitungan, selain referensi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) PBB yang mengatakan ada 15 persen total penduduk dunia adalah penyandang cacat. Di Indonesia belum ada hitungan. Memang ada sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan ada 4,45 persen penyandang cacat dari total penduduk Indonesia.

Tetapi, menurut kami, kenapa kesenjangan itu terlalu jauh antara data WHO dan sensus BPS? Jadi, kami tidak mengakui karena datanya berubah-ubah. BPS sendiri mengakui datanya *underrepresentation*. Tetapi, rencananya BPS pada 2016 akan melakukan survei khusus penyandang cacat.

### Perluakah hak-hal kaum difabel diatur dalam UU tersendiri? Alasannya?

Sangat perlu karena secara normatif kita punya konvensi sendiri dan mengapa dunia sampai menerbitkan konvensi tersendiri tentang penyandang cacat. Mengapa ada konvensi-konvensi. Kebanyakan konvensi itu dilahirkan dari situasi atau tuntutan masyarakat, mengapa tidak bisa setara kehidupannya. Oleh karena itu, sampai dikeluarkannya konvensi bagi isu masyarakat ini.

UU Penyandang Disabilitas, saya pikir, untuk Indonesia sendiri mengakui harus ada UU sebelum ada konvensi, ya *kan*? Diadopsi oleh PBB 13 Desember 2006. Sementara, kita punya UU mengenai disabilitas sejak 1997. Jadi, kita mempunyai UU sendiri jauh sebelum konvensi dibuat.



rakan. Ini artinya penyandang cacat lebih diakui. Para difabel selama ini *nggak* pernah sukses dengan berbagai penanganan apa pun, selalu dicari cara penanganannya, tapi *gak* pernah sukses. Padahal, caranya harus diberi perhatian. Memang kita butuh UU Penyandang Disabilitas, terutama hak-hak asasi.

### Dalam UU itu, nantinya apa yang paling penting untuk diatur oleh negara?

Yang harus diatur negara adalah pelayanan publik terkait dengan dukungan dan memperhitungkan pelayanannya terhadap difabel. Sebenarnya kalau sesuatu itu dari awal didesain terkait dengan bentuk-bentuk penanganannya itu. Tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi *kan*? Kemudian, kalau desain-desain pelayanan publik sudah memperhitungkan fasilitas si penyandang cacat itu sendiri.

Yang harus diperhitungkan negara dalam konvensi difabel itu adalah tiga aspek, internal dan eksternal. Pertama, membangun konsep disabilitas itu sendiri bagaimana dibangun. Aspek kedua, eksternal, yaitu aksesibilitas, ialah sistem itu bagaimana si lingkungan menunjang pembangunan difabel itu sendiri. Ketiga adalah perilaku masyarakat bagaimana si konvensi meningkatkan persepsi positif tentang penyandang cacat untuk menuju peningkatan martabat.

Jadi, yang paling penting dilindungi oleh negara adalah pemenuhan, aksesibilitas, pembangunan si penyandang cacat, pembangunan kemandirian, dan kesadaran pemerintah terhadap keberadaan dan persepsi positif terhadap para difabel.

### Apa harapan Anda terhadap pemerintah sekarang pada kaum difabel?

Memberikan kesamaan kesempatan dan akomodatif. Ketika memberikan kesamaan kesempatan, artinya *ngikut tuh*. Anda akan memperhatikan bagaimana mengimplementasikan niat baik itu. Bukan hanya ya, ya, membuka kesempatan. Ketika punya niat baik, kita harus memikirkan bagaimana implementasinya bisa baik.

### Apa sumbangsih terbesar untuk negara dari kaum difabel salah ini?

Saya pikir penyandang cacat masih kelompok marginal, kelompok yang masih tidak mampu menjadi objek eksploitasi pelecahan. Tetapi, bukan berarti tidak ada penyandang cacat yang berhasil, ada. Oleh karena itu, ada orang-orang yang sangat berhasil dan membawa *barrier* itu dari membawa dia untuk keberhasilan. Misalnya, seperti (almarhum) Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau juga mendengar keterbatasan itu bisa menjadi presider Indonesia.

Lalu kelompok aktivis, bahkan orang yang tidak punya tangan bisa melukis dengan kaki. Artinya kita bisa berkarya penyandang cacat kalau diberikan kesempatan. Bagaimana keluarga bisa membawanya percaya dan menerima bahwa dengan diberikan kesempatan dan fasilitas bisa membangun diri dia secara optimal, itu bisa karena ada contoh yang berhasil. Kalau tidak ada contohnya, kita juga tidak berani. Makanya, kami berjuang karena ada contohnya bahwa mereka bisa dibangun jika diberikan kesempatan.

### Mengapa diskriminasi terhadap kaum difabel sulit hilang?

Paradigma dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas itu masih sangat kental. Karena persepsinya pasti selalu negatif, penyandang cacat itu dianggap tidak mampu. Apalagi, tekanan difabel itu maunya enak saja, apa-apa minta. Tapi, kami memang seperti itu ketika teman-teman tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Apa yang dibuka misalnya, satu sekolah SLB di satu kabupaten cuma dibuka satu.

Selain itu, orang tua memberi para difabel aman bagi pemerintah. Situasi ini harus dilalui dan terpaksa, terus bagaimana? Kita harus hidup, makan, dan tidak dibekali. Penyandang cacat di Indonesia filosofinya seperti mobil berbeda, tapi diminta sama-sama sampai ke sana. Namun ketika mobil ini jalannya satu terseok seok orang cuma memperhatikan itu bukan yang lain. Masyarakat tidak melihat apakah negara sudah adil pada difabel? Padahal, tidak adil. Tapi, kita dituntut sempurna dengan ketidaklengkapan dari kaum difabel salah ini.

Foto: foto Agung Supriyanto/Republika

# Patahkan Stigma Negatif Difabel

■ Oleh Rr Laeny Sulistyawati

**K**ecelakaan yang dialami seorang Maulani A Rotinsulu di Jayapura, Papua, pada 1969 silam, telah mengubah hidupnya. Di usia tujuh tahun, ia terpaksa kehilangan tangan sebelah kanan karena amputasi sebagai dampak kecelakaan mobil. Praktis, sejak anak-anak, Maulani sudah memakai tangan palsu. Meski demikian, ia masih bersekolah di sekolah biasa. "Hanya memang masih ada kendala. Banyak sekali ketidakpahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas itu sendiri," katanya kepada *Republika*, beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, ketika pelajaran olahraga, ia dilarang untuk mengikutinya. Pihak sekolah juga merasa kasihan atau takut menggangukannya. Padahal, kata dia, yang menjadi kendala hanya tangannya. Sedangkan, organ tubuh lain seperti kaki dan matanya normal dan ia sebenarnya bisa melakukan kegiatan itu. Tak hanya itu, keinginannya untuk berenang juga terhalang. Maulani masih terperangkap dengan pendapat orang bahwa ia tidak bisa berenang karena

hanya memiliki satu tangan.

Permasalahan stigma seperti ini bukan hanya dialami Maulani, melainkan juga teman-teman penyandang disabilitas lainnya. "Ketika salah satu fungsi tubuh kita terganggu, masyarakat melihat seluruh indera tubuh tidak berfungsi. Akhirnya, menimbulkan pembatasan-pembatasan," katanya.

Padahal, ia melanjutkan, kalau seorang difabel tidak bisa melihat, bukan berarti ia tidak sanggup berjalan. Menolak menerima paradigma seperti itu, perempuan yang lahir pada tahun 1952 lalu ini ketika kelas dua sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta Utara, akhirnya mengirim surat ke wali kota setempat. "Saya kirim surat yang isinya minta fasilitas khusus di gelanggang remaja untuk penyandang cacat. Misalnya, fasilitas latihan berenang," ujarnya.

Kemudian, kata dia, wali kota menyerahkan surat Maulani ke Dinas Sosial (Dinsos) Jakarta Utara dan menginformasikan ada anak SMA yang mempunyai permintaan tempat olahraga khusus kaum difabel di gelanggang remaja. Dari situlah jalan Maulani untuk aktif di organisasi disabilitas terbuka. Ia didekati gerakan-gerakan penyandang disabilitas.

Kemudian, di usia 19 tahun, ia masuk dalam gerakan penyandang disabilitas, yaitu Himpunan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia, pada tahun 1981 lalu. Tak puas hanya mengikuti satu organisasi, ia kemudian menjadi salah satu pendiri Himpunan Penyandang Cacat Wanita Indonesia (HPCWI) pada 1998. Kemudian, ia bergabung pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dan menjadi ketuanya. Karena ingin mengurus HWDI 2011, ia melepas keanggotaan di Persatuan Penyandang Cacat Tubuh. Tak hanya itu, ia juga menjadi anggota dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sejak 2002.

Maulani kemudian menjadi Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Penyandang Disabilitas Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi. Tetapi, ia merasa capaian perjuangannya terwujud ketika ratifikasi konvensi penyandang disabilitas di Indonesia. Kebetulan, pada saat itu ia memang menjadi koordinator kerja di *leading vocal point* persatuan penyandang disabilitas Indonesia. Pada 2011, tujuannya terwujud. Upaya perjuangannya dapat dicapai ketika Konvensi PBB akhirnya diratifikasi pada tahun 2011 lalu.

**RITA WIDYASARI**, Kartini Dari Kutai Kartanegara

# Perempuan Saat Ini, Sesungguhnya Sudah Sejajar Dengan Laki-laki



**EKSISTENSI** perempuan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini. Dia berjuang keras mengangkat harkat dan memajukan kaum perempuan Indonesia dari keterbelakangan dengan pendidikan. Sejarah mencatat perjuangan Ibu Kartini tidak sia-sia. Kaum perempuan tidak lagi sebagai anggota masyarakat kelas dua, namun sudah sejajar dengan kaum pria, baik dari segi kemampuan dan intelektualitasnya.

Bahkan banyak pula kaum perempuan Indonesia menorehkan prestasi di berbagai bidang sehingga mengharumkan bangsa dan negara Indonesia. Tidak sedikit sekarang ini, kaum perempuan menduduki jabatan-jabatan publik, mulai presiden, menteri, gubernur sampai bupati dan walikota.

Tiap 21 April diperingati buah perjuangan RA Kartini. Apa makna Hari Kartini kali ini bagi Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari:

## Bagaimana Anda melihat peranan perempuan Indonesia saat ini?

Ibu Kartini dan perempuan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari eksistensi sebuah negara. Mereka bagian dari tiang negara. Kalau perempuan diberlakukan dengan baik maka baik pula negara tersebut. Sekarang banyak profesi terbuka bagi perempuan berkarya ke segala bidang, mulai pengusaha, guru, polisi, anggota militer, atlet. Data Badan Kependidikan Negara (BKN), menyebutkan, jumlah PNS perempuan trennya meningkat. Pada 2003, jumlah PNS perempuan sebanyak 1.475.720 orang, kemudian tahun 2013 menjadi 2.102.197 orang. Kondisi ini mendorong perubahan komposisi laki-laki

dan perempuan dalam struktur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada 2003 perbandingan antara PNS laki-laki dan perempuan adalah 59:41. Sedangkan tahun 2013 jumlahnya hampir sejajar yakni 52:48.

Bahkan jabatan presiden sekali-pun pernah dijabat perempuan. Perempuan jadi presiden sesungguhnya fenomena luar biasa dalam dinamika perpolitikan di tanah air. Sebab setelah sekian dekade, selama ini presiden didominasi kaum pria. Akhirnya sejarah mencatat kalau Megawati Soekarnoputri adalah presiden perempuan pertama di republik ini. Jika dipikir dalam hal jabatan publik, kita lebih progresif, bahkan dibandingkan Amerika Serikat sekalipun yang belum pernah ada presiden perempuan.

Sekarang, partisipasi kaum perempuan di bidang politik pun terbilang baik. Mereka maju ke arena pertarungan Pilkada melawan kaum pria. Hasilnya, cukup menggembirakan. Kaum perempuan banyak yang memenangkan pertarungan dan menghantarkan mereka ke jabatan strategis di pemerintahan daerah seperti menjadi menjadi Bupati, walikota dan juga menjadi anggota legislatif seperti DPR dan DPRD.

## Jadi menurut Anda peranan kaum perempuan kita sudah sangat maju?

Dalam soal politik, terutama kesempatan dirasakan begitu. Apalagi, yang penting sekarang sudah ada perhatian yang sangat besar terhadap keterwakilan kaum perempuan, terutama di DPR dan DPRD meskipun belum memenuhi kuota 30 persen. Ini semua jadi cikal bakal memwarai keputusan-keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan perempuan di

masyarakat kita.

## Tidak ada lagi dirasakan diskriminasi?

Kaum perempuan saat ini, sesungguhnya sudah bisa disetarakan dan sejajarkan dengan kaum pria. Realitas itu menunjukkan dalam kondisi kekinian tidak ada bias gender. Karena itu tadi hampir semua lini profesi strategis sudah dirambah kaum perempuan, termasuk di bidang kemiliteran, pengacara dan lain-lain. Ini sangat mengembirakan. Apalagi, kita sudah memiliki hari nasional atau hari besar kaum perempuan, seperti hari Kartini dan Hari Perempuan Internasional.

## Jadi itu sudah dirasakan cukup bagi kaum perempuan?

Pemerintah telah membuka

pintu selebar-lebarnya bagi kaum perempuan untuk berkarya di berbagai bidang. Namun tentunya bagi kaum perempuan untuk bisa berkarya di berbagai bidang, tidak semudah membalikkan tangan. Sepenuhnya sangat bergantung keseriusan mereka untuk menggarap potensi diri.

Kesempatan sudah terbuka, tinggal bagaimana kaum perempuan sendiri bisa mewujudkan agar dapat menaikkan harkatnya sebagai modal membina dirinya sendiri atau pun keluarganya bagi yang sudah menikah.

## Kalau di daerah bagaimana perkembangan perempuan?

Tentu saja, meski banyak kaum perempuan sukses meniti karir, tapi kodrat mereka tetap

sebagai perempuan. Kalau bicara secara general, tidak bisa dibedakan antara perempuan kota dan daerah. Kaum perempuan tetap melewati fase yang tidak bisa dihindari yakni melahirkan, menyusui, menjaga dan membesarkan anak. Belum lagi terkait adat istiadat.

Memang, sekalipun kaum perempuan sebagai salah faktor penting pembangunan ternyata banyak yang nasibnya tak beruntung. Mereka terbelenggu kemiskinan dan berpendidikan rendah pula. Untuk mempertahankan hidup, terpaksa harus bekerja keras.

Alhasil, banyak perempuan memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Nah, yang lebih spesifik, kalau di daerah seperti di Kabupaten kami, kita genjot masalah pendidikan minimal mereka harus lulus SMA. Pendidikan gratis. Bahkan, kalau perlu lebih tinggi lagi. Dengan miliki landasan pendidikan yang baik, mereka lebih bisa berkreativitas dan memiliki wawasan luas dalam menatap masa depannya.

## Jadi penekanannya pada pendidikan?

Anda lihat saja, tidak semua TKI yang bekerja di luar negeri sukses mengumpulkan pundi-pundi uang untuk keluarga di kampung halaman. Banyak TKI tidak beruntung. Disini saya sedih.

Mereka selama bekerja di luar negeri justru mendapat perlakuan tak manusiawi. Mereka disiksa, keringatnya diperas. Bahkan tak jarang TKI menjadi korban nafsu busu majikan. Mereka melawan sehingga pada akhirnya sejumlah TKI tersangkut persoalan hukum. Saya tidak sepakat kalau dikatakan pemerintah tak peduli nasib para TKI.

Pemerintah, sudah menunjukkan kepedulian memberi advokasi hukum. Tapi, masalahnya bukan disitu. Kalau kita bisa meningkatkan pendidikan kaum perempuan, harkat dan derajatnya pun akan meningkat. Mereka mungkin akan berpikir panjang menjadi TKI bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Karena, ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan.

Karena itu, soal wajib belajar 12 tahun kita terapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita harapkan semua perempuan di Kutai Kartanegara minimal lulus SMA, bahkan harus terus belajar setinggi-tingginya. Selain itu, di Kabupaten Kukar kita bertekad bisa membantu mereka.

Seperti janji saya waktu Pilkada ribuan kaum perempuan di Kukar kita berikan kredit tanpa bunga dan jaminan, terutama kepada kaum perempuan dalam satu kelompok usaha bersama. Mereka pun bisa mandiri secara ekonomi dan sukses, mereka bisa menumbuhkan semangat pantang menyerah.

## Sekarang sudah banyak wakil rakyat perempuan di DPR maupun DPRD, bagaimana Anda melihatnya?

Iya, saya berharap agar kaum perempuan yang menjadi anggota DPR harus konsisten dengan janji-janjinya dalam mensejahterakan rakyat, termasuk kepada kaum perempuan. Tak itu saja, kaum perempuan juga harus dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun di lingkungan bekerja dan Trafficking. Semua itu perlu dipertegas dalam bentuk regulasi.

Kaum perempuan harus duduk bersama. Kan banyak nih organisasi perempuan. Mereka perlu

membahasnya secara bersama-sama, terutama kasus penyiksaan TKI oleh majikannya di luar negeri. Dalam konteks kasus itu kan debatable.

Bisa saja majikan menyiksa TKI yang bekerja di rumahnya karena malas dan tidak melaksanakan aturan di rumah majikan.

## Banyak TKI perempuan masih menjadi korban?

Makanya, untuk meminimalisir peristiwa tersebut seharus TKI yang akan bekerja di luar negeri harus dibekali edukasi dan keterampilan. Minimal diberi pemahaman soal aturan bekerja di negara orang. Jadi harus ada perlindungan total negara kepada mereka dalam bentuk regulasi.

Tidak ada yang bisa melindungi mereka selain regulasi. Sejauh ini pemerintah belum secara total membantu TKI yang menghadapi masalah hukum di negeri tempatnya bekerja, terutama yang akan dihukum mati.

Padahal, TKI tersebut adalah warga Indonesia dan sepatutnya pemerintah Indonesia, secara sungguh-sungguh membantu. Kalau pemerintah tidak bisa membantu TKI secara total, terutama kaum perempuan yang bekerja di luar negeri, lebih baik pengiriman TKI dihentikan saja. Mereka seharusnya bisa diberdayakan pemerintah di negerinya sendiri.

Tanpa harus membanting tulang di negeri orang sebagai TKI. Yang bernasib bagus dan memiliki kemampuan, mereka beruntung. Bagaimana TKI yang tidak beruntung dan disiksa oleh majikannya. Jadi harus ada regulasi yang jelas dalam mengirim TKI bekerja di luar negeri, dan TKI yang dikirim juga bukan abal-abal tapi memiliki keahlian dan berpendidikan. ■ **kw**

# Raja Bantah Picu Bentrokan

## Pengangguran dan Kemiskinan Menjadi Akar Masalah

JOHANNESBURG, SENIN – Raja Zulu Goodwill Zwelithini, Senin (20/4), membantah telah memicu kerusuhan xenofobia di Afrika Selatan. Pidato tokoh berpengaruh ini dianggap memicu kekerasan pada warga asing yang menyebabkan tujuh orang tewas dan ribuan orang mengungsi.

Sedikitnya 307 orang ditangkap dalam tiga pekan terakhir terkait kerusuhan tersebut.

Dalam pidatonya yang berapi-api, bulan lalu, Zwelithini menyalahkan imigran atas peningkatan kriminalitas, dan meminta mereka meninggalkan AfSel. Ini dianggap memicu serangan pada warga Zimbabwe, Somalia, Malawi, serta imigran lain di Durban dan Johannesburg, yang memuncak sepekan terakhir.

Namun, dalam pertemuan suku di Durban, sekutu presiden Jacob Zuma itu mengatakan, pidatonya telah salah dimengerti.

"Pidato saya tujukan kepada polisi, mendesak penegakan hukum yang lebih keras, tetapi ini tidak diberitakan. Publik malah mendapat sisi lain pidato yang telah salah diinterpretasikan," katanya. "Kekerasan kepada saudara-saudara kita itu memalukan."

Pidato Zwelithini itu kemudian bergaung. Kelompok yang menyuarakan isu kemiskinan di Afrika Selatan mengatakan, warga asing mengambil keuntungan dari peraturan imigrasi yang longgar. Mereka berbondong-bondong ke AfSel untuk "mencuri" pekerjaan.

Siaran televisi memperlihatkan kerusuhan yang terjadi saat massa anti imigran yang marah dengan bersenjatakan parang menjarah toko-toko yang dimiliki para imigran.

Menurut sensus penduduk, terdapat 1,7 juta warga asing di AfSel. Namun, angka sesungguhnya diperkirakan lebih besar. Perekonomian di AfSel berkembang cukup pesat beberapa waktu terakhir setelah negara itu meninggalkan sistem politik apartheid. Namun, negeri ini ma-

sih bergulat dengan persoalan angka pengangguran yang tinggi, buruknya pelayanan umum, dan kriminalitas yang meningkat.

### Menyelamatkan diri

Warga asal Malawi, Foliass Sakai, mengatakan, ketika mendengar teriakan kemarahan massa dan kapak yang dihantamkan ke pintu rumahnya, pekan lalu, ia sudah berpikir akan menjadi korban tewas kedelapan. Dia lalu melarikan diri lewat atap rumahnya di permukiman kumuh Johannesburg menuju tempat yang lebih aman. "Mereka akan membunuh kami," kata Tendayi Chimukoko, pria asal Zimbabwe, yang membantu Sakai menyelamatkan diri.

Kekerasan xenofobia ini terburuk yang terjadi di Afrika Selatan sejak 2008, saat 67 orang tewas. Bentrokan anti imigran itu juga memaksa ribuan warga asing tinggal di kamp pengungsi sementara.

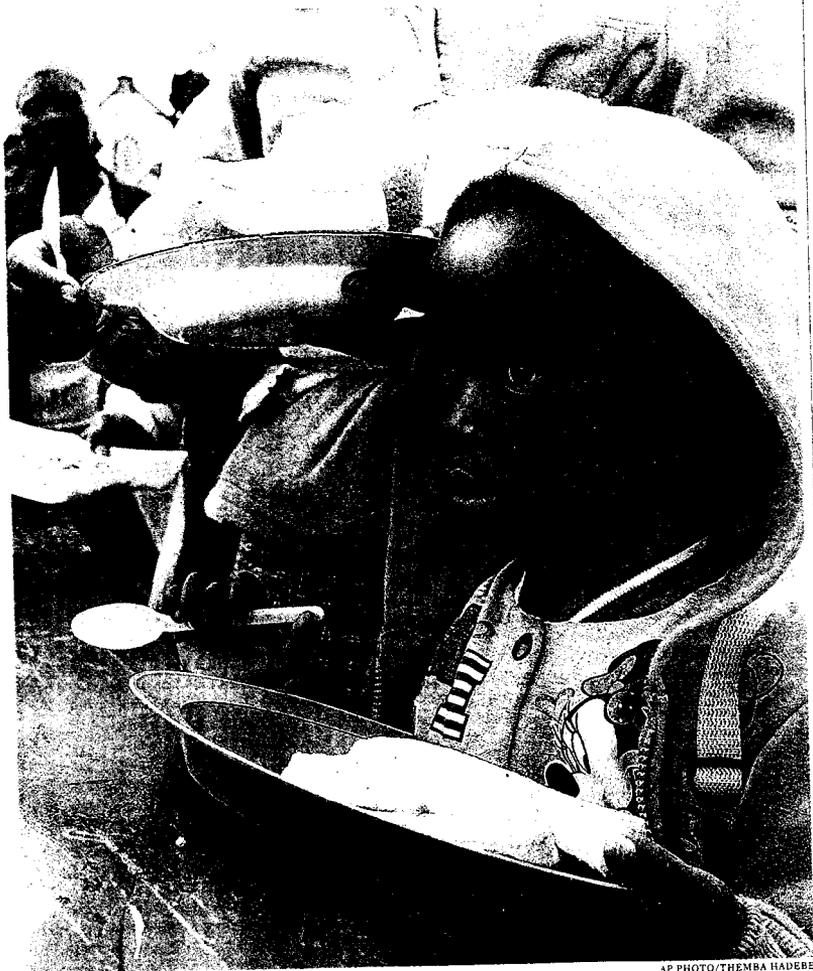
Chimukoko kini berlindung di kamp pengungsi di luar kota Johannesburg. Dia meninggalkan rumahnya di Zimbabwe karena perekonomian negeri itu terus memburuk. Dia menyalahkan pemerintahan Presiden Robert Mugabe yang berkuasa hampir tiga dekade.

"Tak ada pekerjaan di Zimbabwe, makanan pun juga sangat sulit didapat. Jadi kalau saya kembali ke Zimbabwe, saya akan kelaparan," kata Chimukoko.

### Simpati

Namun, banyak juga warga AfSel yang setiap hari juga berjuang keras bersimpati kepada para imigran.

"Memang sangat sulit di sini jika tak memiliki pekerjaan. Ter-



AP PHOTO/THEMBA HADEBE

Seorang bocah antre untuk mendapatkan makanan di kamp pengungsi sementara bagi warga pendatang di timur Johannesburg, Afrika Selatan, Senin (20/4). Tujuh orang tewas dalam serangan atas imigran di Durban dan Johannesburg, pekan lalu. Raja Zulu Goodwill Zwelithini membantah pidatonya menjadi pemicu kekerasan xenofobia, ketakutan kepada warga negara asing.

lalu banyak orang asing," kata Thuthu Mchunu, penganggur warga AfSel dari Actonville di sebelah timur Johannesburg. Ia mengatakan, sejumlah toko di

kota itu sebagian besar kini milik warga asing.

Presiden Jacob Zuma dan Partai Anti Apartheid yang dipimpin Nelson Mandela mengancam ke-

kerasan anti imigran tersebut dan mendesak warga Afrika Selatan tidak melampiaskan rasa frustrasi mereka kepada warga asing. (REUTERS/LOK)



# MK: Dokter Tetap Dapat Dipidanakan

## Ilmu Kedokteran sebagai Rujukan Penanganan Kasus

JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sejumlah dokter yang mempersoalkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Alasannya, ketentuan pelaporan pidana atau gugatan perdata yang bisa dilayangkan pasien bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan pemangku kepentingan umumnya.

Demikian putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian konstitusionalitas Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Uji materi diajukan sejumlah dokter muda yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu antara lain Agung Sapta Hadi, Yadi Permana, dan Irwan Khresnamurti.

Pasal 66 Ayat (3) UU No 29/2004 berbunyi "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) tak menghilangkan hak tiap orang melaporkan dugaan tindak pidana pada pihak berwenang".

Menurut pemohon, pasal itu membuka interpretasi luas terhadap tindakan kedokteran dan dengan penafsiran luas membuat

pelanggaran kedisiplinan seorang dokter jadi kasus pidana. Itu menimbulkan ketakutan kalangan dokter untuk mengambil tindakan kepada pasien yang berisiko tinggi ataupun dalam kondisi darurat karena bisa dipersalahkan akibat kelalaian yang menyebabkan pasien meninggal.

### Melindungi hak pasien

Namun, MK tak sependapat dengan hal tersebut. Hakim Konstitusi Muhammad Alim saat membacakan pertimbangan MK, Senin (20/4), di Jakarta, menyatakan, laporan secara pidana dan/atau gugatan perdata tetap perlu untuk melindungi hak-hak pasien dan pemangku kepentingan. Itu juga untuk melindungi hak pasien jika tindakan dokter

atau dokter gigi dinyatakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) melanggar disiplin profesi kedokteran dan merugikan pasien.

Proses pidana atau gugatan perdata pada perkara kedokteran, lanjut Alim, menurut Pasal 66 Ayat (3) UU Praktik Kedokteran, harus dimaknai dengan menjadikan ilmu kedokteran, khususnya kode etik dan disiplin profesi kedokteran, sebagai rujukan penanganan. Oleh karena itu, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang harus mendengarkan pendapat dari pihak kompeten di bidang tersebut.

Alim menambahkan, hal serupa harus dilakukan ketika aparat hukum menafsirkan peraturan terkait dengan tindakan dokter atau dokter gigi. Hal tersebut juga mesti diterapkan dalam penilaian terhadap tindakan yang dilakukan.

Pelaksanaan peradilan yang menjadikan ilmu kedokteran sebagai salah satu rujukan dalam mengadili dokter dan/atau dokter gigi yang diduga melakukan malapraktik dinilai telah mem-

batasi risiko yang harus ditanggung dokter ataupun dokter gigi dari pelaporan pidana atau gugatan perdata.

"Artinya, dalam proses pengadilan, akan tertutup kemungkinan dijatuhkan sanksi pidana dan/atau perdata kepada dokter ataupun dokter gigi yang tindakan medisnya dinyatakan MKDKI telah sesuai atau tak melanggar disiplin profesi kedokteran," kata Alim.

Menanggapi putusan tersebut, Agung Sapta Hadi mengungkapkan kekecewaannya. Putusan MK itu tetap membuat dokter ketakutan mengambil tindakan medis karena bisa dibawa ke ranah pidana. Padahal, belum tentu kesalahan tersebut merupakan bentuk kesengajaan dan di luar disiplin profesi kedokteran.

Jika dokter dinyatakan tak bersalah melanggar etik profesi oleh MKDKI, lanjut Agung, semestinya juga dimaknai tak ada pelanggaran hukum. "Dengan putusan ini, MKDKI seakan tak berguna ketika dinyatakan tidak ada pelanggaran profesi, tetapi secara hukum tetap dikenai pasal KUHP," ujarnya. (ANA)

# UE Janji Tangani Krisis Imigran

**LUXEMBOURG** – Para menteri luar negeri (menlu) Uni Eropa (UE) berjanji akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah tragedi kematian para imigran di Laut Mediterania.

Mereka akan meningkatkan operasi penyelamatan dan penangkapan para pelaku perdagangan manusia.

Sikap tegas UE itu setelah tragedi tenggelamnya kapal yang mengangkut lebih dari 700 imigran di perairan Mediterania akhir pekan lalu. Sebagian besar pemerintahan negara anggota UE enggan mendanai operasi penyelamatan karena khawatir akan mendorong warga di Afrika utara untuk tetap bersemangat mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa. Tapi, kini mereka harus bertindak karena banyak imigran yang tewas saat berlayar ke Eropa.

"Apayang terjadi pada (krisis imigran) menyangkut reputasi UE," kata Menlu Italia Paolo Gentiloni kepada reporter saat hendak mengikuti rapat di Luxembourg kemarin. "Kita tidak memiliki tanggung darurat UE dan jawaban dari Italia (mengenai krisis imigran itu)," im-

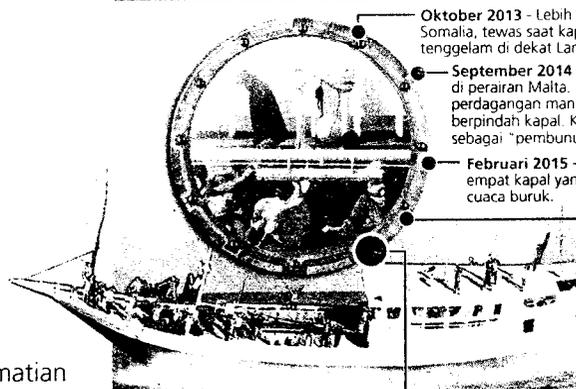
buhnya dikutip Reuters.

Para menlu UE meningkatkan cipta selama beberapa detik sebelum memulai rapat untuk memberikan penghormatan kepada para korban imigran yang tewas. Komite Eksekutif UE mengungkapkan, pasukan penjaga pantai Italia berhasil menyelamatkan 8.000 imigran di Laut Mediterania dalam satu pekan terakhir.

Data Badan Persekitaran Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR) menyebutkan sedikitnya 3.500 orang meninggal saat menyeberang di Laut Mediterania pada 2014.

Kepala Kebijakan UE Federica Mogherini mengungkapkan, dia ingin membangun kesepakatan dan tanggung jawab untuk menangani krisis pengungsi itu. Para pemimpin UE juga akan menggelar Konferen-

## TRAGEDI LAUT MEDITERANIA



**Oktober 2013** - Lebih dari 360 orang, mayoritas warga Somalia, tewas saat kapal yang mereka tumpangi tenggelam di dekat Lampedusa, Italia.

**September 2014** - Sedikitnya 300 migran tenggelam di perairan Malta. Insiden itu terjadi saat para pejuang perdagangan manusia meminta para migran berpindah kapal. Korban selamat menyebut itu sebagai "pembunuhan massal".

**Februari 2015** - Sedikitnya 300 imigran tewas setelah empat kapal yang mereka tumpangi tenggelam akibat cuaca buruk.

**12 April 2015** - Sekitar 400 imigran tewas setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Libya.

**19 April 2015**  
Sekitar 700 imigran tenggelam di selatan Pulau Lampedusa.

## IMIGRAN DALAM ANGKA



**13.500**  
Jumlah imigran Mediterania diselamatkan pada 10-17 April.

**1.600**  
Total imigran tewas yang berusaha melintasi Laut Mediterania tahun ini.

**35.000**  
Keseluruhan imigran yang tiba dari beberapa negara Afrika utara pada 2015.

**218.000**  
Jumlah imigran yang melintasi Laut Mediterania pada 2014.

**3.500**  
Total imigran yang tewas menyeberangi Laut Mediterania tahun lalu.

## GENOSIDA DI LAUT MEDITERANIA

Uni Eropa (UE) hanya berdiam diri melihat genosida di Laut Mediterania. Mereka yang mengklaim peduli dengan hak asasi manusia (HAM) justru tidak berupaya untuk menyelamatkan ribuan imigran asal berbagai negara di Afrika utara yang tenggelam saat hendak mencari suaka di Eropa.

## OPERASI PENYELAMATAN



**Mare Nostrum**, operasi penyelamatan itu dilakukan otoritas Italia itu bertujuan untuk memantau selama 24 jam Laut Mediterania, khususnya Selat Sicily. Operasi itu hanya berlangsung satu tahun sejak Oktober 2013 hingga Oktober 2014.

**Operasi Triton**, operasi yang digelar beberapa negara Uni Eropa itu dimulai dari perairan Italia dengan fokus utama 30 mil dari perairan negara itu.

si Tingkat Tinggi (KTT) darurat di Brussels pekan ini.

"Tugas moral UE untuk mencegah tragedi itu terjadi lagi dan lagi. Kita tidak lagi memiliki lebih banyak alasan (untuk tidak segera bertindak)," kata Mogherini,

dilansir AFP. Dia juga menegaskan tidak ada solusi mudah dan magis dalam penanganan krisis pengungsi itu. "Insiden tenggelamnya kapal imigran itu akan memberikan momentum untuk mencari kebijakan migrasi yang

sama," tambahnya.

Pemerintah Inggris mengusulkan penangkapan mafia penyelundupan manusia di Afrika utara yang memperoleh ribuan dolar setiap mengirim warga ke perairan Mediterania. Sedang-

kan Australia mendukung proposal Italia untuk mendirikan kamp di Timur Tengah dan Afrika untuk menampung permintaan suaka sehingga tidak perlu menyeberangi Laut Mediterania.

Menteri Urusan Eropa dari

Francis Harlem Desir mengatakan, operasi perlindungan perbatasan UE Triton yang menggantikan Mare Nostrum ternyata tidak efektif karena ruang kerjanya sangat dibatasi.

● **andika hendram**